

BAB I

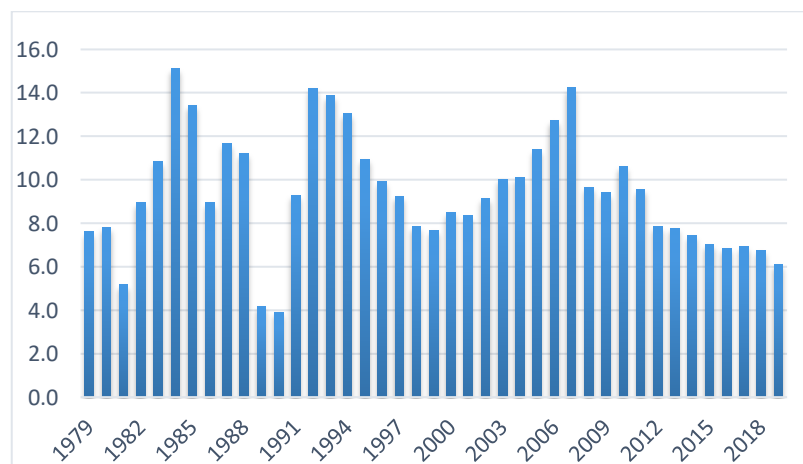
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Republik rakyat Tiongkok (RRT) merupakan *emerging industrial economic* yang kehadirannya mulai diperhitungkan didekade belakangan karena tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat pasca reformasi yang dilakukan oleh pemimpin Deng Xiao Ping pada tahun 1978. Berikut grafik yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan PDB riil Tiongkok dari tahun 1979 – 2018.

Grafik 1.1

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari tahun 1979 – 2019
(dalam %)



Sumber : diolah dari www.databank.worldbank.org

Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan produk domestik bruto Tiongkok rata-rata dari tahun 1979 hingga 2018 mencapai 9,2 %, penurunan pertumbuhan di tahun 2008 mencapai 9,6% dimana tahun sebelumnya pertumbuhan mencapai 14,2% penurunan ini disebabkan masalah domestik¹ yang

¹ Menurut ahli ekonomi, penurunan pertumbuhan GDP oleh Tiongkok merupakan fenomena ekonomi yang disebut "*middle-income trap*" dimana dalam masa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami stagnasi atau perlambatan ekonomi dari tingkat atau level sebelumnya selama waktu yang berkelanjutan. *World Bank* mengklasifikasikan tingkatan pertumbuhan

dihadapi Tiongkok terkait fokus Tiongkok selama ini yang lebih menekankan pada penerimaan investasi asing dan ekspor perlu melakukan inovasi dan lebih menekankan pada peningkatan konsumsi swasta dan layanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kembali. Selanjutnya pertumbuhan semakin melambat dari tahun 2010 hingga sekarang karena sanksi impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat kepada Tiongkok serta pembalasan yang dilakukan Tiongkok (Wang Hongying, 1999 p. 538-539) (Wayne Morrison, 2019 p. 5).

Pemimpin Deng melakukan reformasi ekonomi yang mana sistem ekonomi yang digunakan oleh Tiongkok sebelum reformasi bersifat ekonomi komando, yang artinya perencanaan kegiatan ekonomi dilakukan secara terpusat. Dalam sistem ekonomi komando sebagian besar penghasilan ekonomi negara dikendalikan dan diarahkan oleh negara yang meliputi tujuan produksi, kontrol harga dan alokasi sumber daya ekonomi. Setelah direformasi berubah menjadi sistem ekonomi sosialis-kapitalis dimana perekonomian Tiongkok menerapkan mekanisme pasar, membuka perdagangan dan melakukan investasi dengan negara Barat. Usaha pertama pemimpin Deng dalam reformasi ekonomi dilakukan dengan menginisiasi kepemilikan bagi petani, dimana hasil panen yang didapatkan oleh petani dapat dijual ke pasar bebas, pengurangan kontrol negara atau pemerintah pada bidang perdagangan, agrikultur dan industri, dimana pemerintah pusat memberikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan perekonomian daerahnya – desentralisasi, hal ini termasuk didalamnya yaitu pembangunan fasilitas atau infrastruktur untuk mendorong modernisasi ekonomi, membangun zona ekonomi khusus sepanjang pantai daratan Tiongkok dengan tujuan untuk menarik investasi asing, mendorong ekspor dan melakukan impor produk teknologi tinggi ke Tiongkok, selain modernisasi ekonomi pemerintah juga melakukan liberalisasi sektor keuangan dengan memanfaatkan keberadaan bank (Morrison, 2019 p. 2-4).

ekonomi negara didasarkan pada rentang (*ranges*) pendapatan bruto nasional per kapita (*Gross National Income/GNI*) suatu negara, yang mana *range* disesuaikan setiap tahunnya. Ada empat klasifikasi, yaitu *Low-income economies*, *Lower-middle-income economies*, *Upper-middle-income countries* dan *High-income countries*. (Morrison, 2019 p.7)

Pemikiran pemimpin Deng Xiao Ping untuk memodernisasi sektor ekonomi dan keuangan, nyatanya tidak menghilangkan identitas diri Tiongkok sebagai negara dengan ideologi sosialis, reformasi yang dilakukan oleh pemimpin Deng tidak menyentuh bidang politik, dimana paham komunisme tidak hilang bahkan simbol-simbolnya masih ada dan dipertahankan, bahkan Partai Komunis China (PKC) masih menjadi partai dominan di Tiongkok. Pemimpin Deng sendiri menyebut reformasi sistem ekonomi ini sebagai “Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok” (Wasserstrom 2013, p. 92-95). Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar ini oleh penerus pemimpin Tiongkok setelah Deng Xiao Ping dilanjutkan hingga di masa kepemimpinan Xi Jinping, dimana telah berjalan selama empat dekade. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat telah menarik perhatian negara-negara lain untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok faktor yang menjadi penyebabnya adalah investasi asing di sektor manufaktur yang berorientasi pada produksi ekspor dan peningkatan produktifitas atau efisiensi (Morrison, 2019 p. 6).

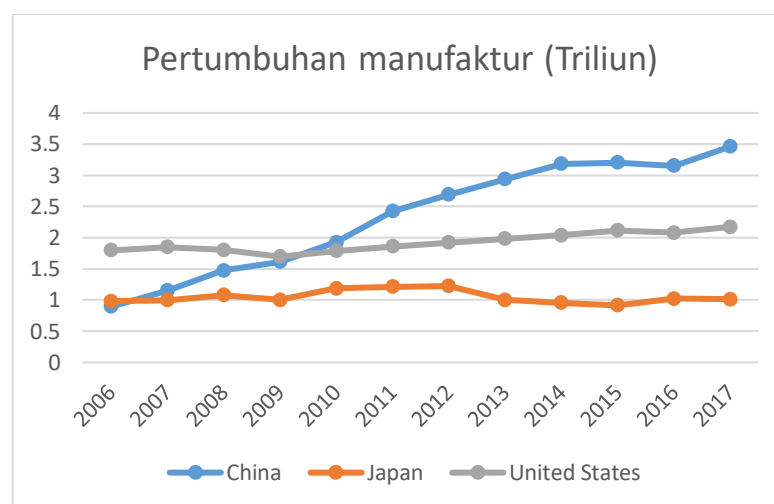
Dengan berlimpahnya tenaga kerja dengan upah kerja rendah yang berdampak pada minimalisasi biaya produksi menjadi daya tarik perusahaan asing untuk melakukan proses produksi perusahaannya di Tiongkok salah satunya perusahaan Amerika serikat. Proses produksi ini memberikan keuntungan untuk produk perusahaan asing lebih kompetitif di kancah internasional, selain itu populasi Tiongkok yang besar juga menjadi pangsa pasar yang menjanjikan untuk memperoleh keuntungan lebih dan menyediakan variasi produk murah untuk konsumen Amerika serikat dan negara lainnya. Perdagangan yang dilakukan pemerintah Tiongkok dengan Amerika serikat menempatkan Tiongkok sebagai partner dagang terbesar ke-tiga Amerika serikat; partner perdagangan barang terbesar, sumber impor terbesar dan sebagai pangsa pasar ekspor terbesar ke-tiga Amerika serikat, selain itu Tiongkok juga negara pemegang surat hutang Amerika serikat terbesar setelah sebelumnya di pegang oleh Jepang, rekor surat hutang yang pernah dipegang oleh Tiongkok sebesar 1,7 triliun pada tahun 2011, pada April 2019 tercatat mengalami penurunan menjadi 1,1 triliun yang mana pembelian surat

hutang oleh Tiongkok membantu Amerika Serikat menjaga suku bunga AS relatif rendah (Morrison, 2019 p. 1).

Menurut *World Bank*, Tiongkok telah menjadi negara manufaktur terbesar di dunia, dimana pertumbuhan produksi manufaktur Tiongkok tumbuh pesat melampaui Amerika Serikat dan Jepang.

Grafik 1.2

Nilai Tambah Bruto Manufaktur Tiongkok, Jepang dan AS pada tahun 2006 – 2017 (dalam triliun USD)



Sumber : diolah dari www.databank.worldbank.org

Dalam gambar diatas dapat dijelaskan pertumbuhan manufaktur antara Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang pada tahun 2006 sampai 2017, pertumbuhan perdagangan barang Tiongkok selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 0,89 triliun USD menjadi 3,5 triliun USD meningkat sebesar 2,61 triliun USD. Sedangkan Jepang pertumbuhan selama 10 tahun terakhir bisa dikatakan stagnan sama halnya dengan Amerika Serikat peningkatan tidak signifikan.

Berikut tabel yang menunjukkan mitra dagang Tiongkok pada tahun 2018;

Tabel 1.1

5 Mitra Dagang Utama Tiongkok pada tahun 2018 (dalam miliar USD)

Partner Name	Trade Balance	Export	Import	Total trade
East Asia & Pacific	8	944	936	1881
Europe & Central Asia	114	517	402	919
North America	331	515	184	700
United States	324	480	156	636
Japan	-33	147	180	328

Sumber : www.wits.worldbank.org

Dalam tabel tersebut menunjukkan lima mitra dagang Tiongkok dengan negara-negara didunia, dimana Amerika serikat menempati urutan ke-empat, setelah negara-negara asia timur dan pasifik, negara-negara eropa dan asia tengah, Amerika utara dan diurutan ke lima Jepang, dari ke-empat mitra dagang-nya, Tiongkok mengalami surplus dagang, akan tetapi dengan Jepang, Tiongkok mengalami defisit dagang. Surplus dagang dengan Amerika serikat memberi dampak defisit bagi pihak AS. Berdasarkan data diatas, total perdagangan Tiongkok dengan AS sebesar 636 juta USD, dengan total impor dari AS sebesar 156 juta USD dan ekspor ke AS sebesar 480 juta USD, sehingga menghasilkan surplus dagang sebesar 324 juta USD untuk Tiongkok (www.wits.worldbank.org , 11/06/2020). Komoditas utama ekspor Tiongkok ke Amerika serikat adalah produk-produk mesin seperti peralatan *broadcasting* dan komputer yang mendominasi, senilai 243 miliar USD dengan masing-masing senilai 57,8 miliar USD dan 46,2 miliar USD (www.atlas.media.edu.mit , 06/06/2020).

Hubungan bilateral Amerika serikat dengan Tiongkok tertuang dalam *U.S. – China Relations Act 2000*. Dalam perjanjian tersebut Amerika serikat memberikan Tiongkok hubungan dagang normal permanen serta membuka jalan bagi Tiongkok untuk bergabung dalam organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 2001 (www.cfr.org , 06/06/2020). Defisit perdagangan yang dialami Amerika serikat mendorong pemerintah Amerika serikat

untuk melakukan proteksi dagang dengan Tiongkok, yaitu berupa pengenaan tarif impor atas barang-barang asal Tiongkok, alasan lain yang memotivasi proteksi dagang Amerika Serikat diantaranya terkait keamanan nasional Amerika Serikat yang menganggap bahwa praktek dagang yang dilakukan Tiongkok merugikan mitra-nya khususnya Amerika Serikat seperti keharusan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi ke Tiongkok untuk melakukan transfer teknologi, juga kaitannya dengan hak kekayaan intelektual serta persaingan harga yang menyakiti industri domestik Amerika Serikat (Williams. 2019, p. 5). Hal ini kemudian menimbulkan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang terjadi pada tahun 2018.

Kebijakan proteksi dagang yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat merupakan bentuk realisasi janji kampanye presiden Donald Trump pada pemilihan presiden tahun 2016 lalu dengan membawa slogan “*make America great again*” dan “*America’s first*”, dimana presiden Trump berusaha mendorong aktivitas industri ekonomi domestik AS yang mengalami penurunan permintaan dengan hadirnya produk Tiongkok dengan harga yang lebih rendah, peneliti mengatakan bahwa kebijakan tersebut secara langsung mencederai hukum internasional yang mencetuskan konsep perdagangan bebas dan perjanjian multilateral yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia, selain itu, kebijakan proteksi dagang merujuk pada kebijakan egoisme yang didasarkan pada kepentingan nasional (Kapustina et.al, 2019 p. 2).

Menurut Min Hyung Kim dalam *A real driver of U.S. – China trade conflict* bahwa perdagangan bebas merupakan *positive-sum game* dimana setiap negara yang terlibat dalam aktivitas perdagangan akan memperoleh keuntungan sedangkan menurut Larisa Kapustina dkk dalam *U.S.-China trade war: causes and outcomes* perang dagang tidak menghasilkan pemenang yang ada hanya kerugian bagi semua negara. Perang dagang yang terjadi antara pemerintah Amerika Serikat dengan Tiongkok bukan didasarkan pada alasan ekonomi yang dirasa merugikan pemerintah Amerika Serikat tetapi juga aspek politik, militer dan teknologi, dimana Tiongkok sebagai *emerging economic power* sedang giat melakukan

pengembangan dan modernisasi akan tetapi oleh Amerika Serikat upaya modernisasi Tiongkok dianggap sebagai ancaman untuk keberlangsungan kekuatannya di kancah internasional khususnya di wilayah Asia-pasifik.

Berdasarkan beberapa penelitian yang mengkaji mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok belum banyak yang mengkaji perang dagang dengan menggunakan konsep *balance of power*, diantara penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu penelitian dengan judul “Dampak perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terhadap Indonesia pada tahun 2018” yang ditulis oleh Siti Munawaroh, hasil analisa penelitian tersebut menyatakan bahwa perang dagang yang terjadi antara dua negara adidaya tersebut akan membuka kesempatan bagi negara ketiga untuk mengisi pasar yang kosong, sedangkan dampak bagi Indonesia sendiri tidak signifikan, karena produk yang dikenai penambahan tarif bukan fokus produk ekspor Indonesia di kedua negara, dan pangsa pasar yang kecil Indonesia di kedua negara, Indonesia juga bukan mitra dagang utama bagi Amerika Serikat. Juga dampak tidak langsung bagi Indonesia diantaranya nilai tukar dan perekonomian yang melambat. Selain itu, Indonesia juga memiliki peluang untuk mengisi kekosongan pasar, diantaranya buah-buahan dan produk dari baja dan aluminium.

Sedangkan penelitian milik Elsa Seirafina Ardhani berjudul “Perang dagang Amerika Serikat dengan China: Trump vs. Xi Jinping?” menyoroti tentang motivasi dikeluarkannya kebijakan perang dagang oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan presiden Trump yaitu selain kepentingan ekonomi juga adanya kepentingan politik presiden Trump untuk merealisasikan janji-janji kampanye-nya untuk mengembalikan kejayaan Amerika Serikat dengan slogan “*Make America Great Again*” dan “*America First*”, dalam menganalisa penelitian ini menggunakan teori Ekonomi Politik Internasional dan Model Aktor Rasional. Selain itu, ada beberapa penelitian lain yang membahas mengenai “Dampak perang dagang Amerika Serikat dengan China terhadap ekspor batubara Indonesia ke China” oleh Yoga Indra Purnama pada tahun 2019 dari Universitas Pasundan; “Dampak perang dagang Amerika Serikat – China di era presiden Donald Trump”

oleh Valen Kerin Parerung pada tahun 2019 dari UPN Veteran Yogyakarta; dan “Stabilitas hegemoni AS di tengah hadirnya pengaruh Tiongkok pasca lahirnya inisiasi *One Belt One Road*” oleh Dimas Dwi Santoso dari Universitas Lampung.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya mendorong penulis untuk mengambil penelitian yang berjudul “Tiongkok: Analisa *Balance of Power* dalam Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018” dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan upaya modernisasi yang dilakukan oleh Tiongkok untuk melakukan penyeimbangan terhadap kekuatan Amerika Serikat sebagai hegemon sehingga menghasilkan perang dagang yang terjadi antara kedua negara pada tahun 2018. Urgensi dari penelitian ini adalah kemunculan Tiongkok sebagai *emerging economic power* yang menarik perhatian negara-negara di dunia khususnya Asia untuk menjalin kerjasama sehingga menggeser kekuatan yang sebelumnya mendominasi Asia yaitu Amerika Serikat mengalami penurunan pengaruh di wilayah Asia-Pasifik.

Penelitian ini menggunakan teori neorealisme konsep *balance of power* dan dua pandangan yang menjadi turunan dari teori neorealisme yaitu realisme defensif dan realisme ofensif untuk menganalisa penyebab perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018. Upaya-upaya *balance of power* yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap kekuatan Amerika Serikat telah menyebabkan terjadinya perang dagang, dimana dalam teori neorealisme menekankan pada pencapaian kekuatan atau *power* sebagai alat politik yang digunakan oleh negara dalam politik internasional untuk mencapai kepentingan nasional dari suatu negara sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan hidup negara-nya di dalam sistem internasional yang anarki, kapabilitas kekuatan yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda sehingga memunculkan adanya great power yaitu negara dengan kapabilitas yang besar menjadi hegemon atas negara dengan kapabilitas rendah, dalam upaya nya untuk bertahan hidup negara melakukan penyeimbangan terhadap kekuatan besar tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus peneliti adalah : ”Mengapa terjadi perang dagang antara Amerika serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018 dilihat dari perspektif *balance of power* Tiongkok”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah : untuk mengetahui penyebab terjadinya perang dagang antara Amerika serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018 sebagai hasil *balance of power* yang dilakukan oleh Tiongkok ke Amerika serikat.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui sejarah hubungan Amerika serikat dengan Tiongkok dan menjelaskan kronologi atau alur perang dagang yang terjadi antara Amerika serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018.
2. Untuk menjelaskan upaya *balance of power* yang dilakukan Tiongkok sehingga menyebabkan terjadinya perang dagang antara Amerika serikat dengan Tiongkok yang terjadi pada tahun 2018.

1.4 Manfaat penelitian

- a. Manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan akademik dalam bidang Hubungan Internasional, lebih spesifik dalam menganalisa *balance of power* yang dilakukan oleh Tiongkok hingga menyebabkan perang dagang antara Amerika serikat dengan Tiongkok
- b. Manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memahami analisa *balance of power* yang dilakukan Tiongkok dalam rangka menyeimbangkan kekuatan hegemon Amerika serikat.

1.5 Kerangka Teori

Rumusan masalah dalam penelitian adalah untuk mengetahui penyebab perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang terjadi pada tahun 2018 dilihat dari perspektif *balance of power* Tiongkok, penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan paradigma realisme teori neorealisme dengan menggunakan konsep *balance of power* dan realisme struktural defensif yang merupakan hasil pengembangan dari neorealisme.

Paradigma realisme adalah tradisi analisis yang menekankan imperatif yang di hadapi oleh negara untuk mengejar politik kekuasaan dan mencapai kepentingan nasional, sebutan lain dari realisme politik yaitu *realpolitik* atau *power politics*. Realisme memiliki asumsi dasar bahwa negara merupakan aktor utama (*state-centrism*) dalam hubungan internasional yang bersifat rasional, artinya negara dalam bertindak mempertimbangkan *cost* dan *benefit*, perilaku negara dipengaruhi oleh sifat manusia (*human nature*) yang cacat dari pemimpinnya dan oleh sistem internasional yang anarki (Donnelly, dalam Burchill et al. 2005, p. 29-30). Realisme lebih menekankan pada sifat manusia (*human selfishness*) yang menginginkan kekuasaan sehingga menjadi sumber terjadinya konflik, Waltz memiliki pendapat berbeda dengan menekankan pada struktur internasional yang mempengaruhi tindakan negara untuk memperoleh kekuatan, dari perbedaan pandangan atas *power* memunculkan teori neorealisme atau realisme struktural (Folker, 2006 p. 15) (Maersheimer dalam Dunne et.al, 2012 p. 78).

Negara sebagai aktor tunggal (*unitary actor*) dalam hubungan internasional, realis tidak menganggap penting aktor lainnya seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional (Folker, 2006 p. 16). Tindakan negara dipengaruhi oleh sifat manusia yang cacat dan egois (*selfish*) dalam mengejar dan mengakumulasi kekuatan (*power*) sebagai jaminan keamanan (*security*) negara-nya di dunia yang *self-help* (Elman dalam Griffiths, 2007 p. 11), egoisme dapat memicu terjadinya perang antar negara, “...*conflict and war are rooted in human nature (Waltz 1991: 35)*” (Donnelly, dalam Burchill et al. 2005, p. 31), kondisi ini diperparah dengan sistem internasional yang bersifat anarki, adalah kondisi dimana tidak adanya

kekuasaan yang lebih tinggi daripada negara sehingga tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang dapat bertindak sebagai penengah atau mediator dalam mengatasi konflik antar negara (Folker, 2006 p. 14).

Faktor penting lainnya yaitu adanya *relative power*, meskipun banyak orang tidak menganggapnya sebagai proposisi teoritis yang menarik akan tetapi *relative power* penting sebagai penentu apa yang dapat dicapai oleh negara dalam dunia politik, “*who gets what*”, negara dibedakan berdasarkan kekuatan atau kapabilitas yang dimilikinya, *great power* dan *small power*. Menurut Thomas Hobbes *great power* adalah negara dengan kapasitas untuk menimbulkan kerusakan, bahkan ancaman kematian pada kekuatan lain yang berada dalam sistem (Donnelly, dalam Burchill et al. 2005, p. 34), sedangkan menurut Waltz realis struktural mengikuti pendekatan realisme klasik yang dikemukakan oleh Robert Rothstein bahwa *great power* adalah negara yang bisa berperang melawan negara manapun, *small power* adalah negara yang tidak bisa memperoleh keamanan dengan kemampuannya sendiri (Ross, 2006 p. 362), struktur realis juga menekankan pada variabel struktural yaitu distribusi kapabilitas, bahwa jumlah *great power* dalam sistem mempengaruhi hubungan internasional istilah ini disebut sebagai polaritas; unipolar, bipolar dan multipolar.

Tujuan akhir negara adalah memperoleh kekuatan (*power*), dalam sistem internasional yang anarki dimana negara hanya diberi pilihan yang terbatas untuk menjaga kelangsungan hidup negara-nya dan tercapai kepentingan nasionalnya realis berpendapat bahwa negara akan melakukan apapun meskipun dengan cara mengorbankan negara lain atau setidaknya mereka tidak kehilangan kekuatan (Mearsheimer dalam Dunne et.al, 2012 p. 77). Kekuatan (*power*) dalam hubungan internasional menurut Baldwin yang dikutip oleh Sterling Folker dalam *Making Sense of International Relations Theory* merupakan istilah yang umum digunakan secara relasional untuk menunjukkan kemampuan suatu negara dalam mempengaruhi dan mengendalikan negara lain atau hasil (*outcomes*) maupun peristiwa yang berkaitan dengan negara tersebut. Ada perbedaan pendapat mengenai *power* sebagai tujuan negara, menurut Maersheimer tujuan akhir negara

adalah memaksimalkan kekuatan mereka diatas negara lain, dimana negara cenderung untuk menjadi hegemon. Sedangkan menurut Waltz, *power* merupakan alat untuk mencapai tujuan dan tujuan akhir adalah menjaga kelangsungan hidup (*survival*) perbedaan ini memunculkan dua pandangan yaitu realisme ofensif dan realisme defensif (Donnelly, dalam Burchill et al. 2005, p. 41 - 42).

Kombinasi sistem internasional yang anarki dan *relative power* mengarah pada pola perilaku negara untuk melakukan *balance of power* (Folker, 2006 p. 14), Kekuatan (*power*) dan *balance of power* merupakan jaminan bagi suatu negara untuk memperoleh keamanan (Maersheimer dalam Dunne et.al, 2012 p. 63). Realisme struktural memandang bahwa dalam sistem internasional yang anarki negara cenderung untuk *balancing*, karena dengan *balancing* negara berusaha mengurangi resiko ancaman keamanan nasionalnya dengan melawan *great power*, secara internal *balancing* dilakukan dengan merealokasi sumber daya untuk kemandirian nasional dan secara eksternal dengan membentuk aliansi dan perjanjian baik secara formal maupun non-formal (Donnelly, dalam Burchill et al. 2005, p. 36), *balance of power* merupakan fungsi utama dari aset militer yang terlihat yang dimiliki oleh negara seperti senjata nuklir dan persenjataan militer (*hard power*), selain itu negara memiliki pilihan kekuatan lain, kekuatan laten atau *soft power* yang merujuk pada kekayaan negara dan jumlah penduduk yang dimiliki oleh suatu negara (*socio-economic ingredients*)(Maersheimer dalam Dunne et.al, 2012 p. 78), dalam mencapai *power*, negara dapat melakukan kompetisi atau *balancing* dengan *great power* dengan memanfaatkan kekuatan laten yang dimilikinya disebut sebagai *soft-balancing* (Pape 2005, p. 10).

Menurut Joseph Nye dalam tulisannya yang berjudul *Soft power* mengatakan bahwa definisi *power* kehilangan penekanannya pada kekuatan militer dan lebih menekankan pada faktor teknologi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi disebut sebagai *soft power*. Kombinasi kedua kekuatan tersebut, *hard power* dan *soft power* menghasilkan *smart power*, merupakan kapasitas aktor dalam memperkuat kekuatan-kekuatan yang dimilikinya sehingga dapat mencapai tujuan atau kepentingan nasional secara efektif dan efisien (Wilson 2008 p. 110).

Menurut R. S. Ross dalam tulisannya yang berjudul *Balance of Power Politics and the rise of China: accommodation and balancing in East asia* bahwa *balance of power* merupakan proses dimana distribusi kekuatan yang sama muncul dari waktu ke waktu dan *BoP* merupakan peristiwa yang selalu terjadi berulang-ulang yang disebabkan oleh peningkatan kapabilitas kekuatan yang dilakukan oleh *great power* sebagai bentuk tanggapan terhadap kemunculan kapabilitas *great power* lainnya. Politik *BoP* tradisional merupakan ciri dari politik internasional kontemporer dimana regional *great power* menantang kepentingan keamanan vital dari kekuatan status quo, dalam hal ini Ross berasumsi bahwa *balancing* sedang berjalan di Asia Timur, dimana Tiongkok tumbuh menjadi negara perekonomian terbesar di Asia Timur melakukan penyeimbangan atas kekuatan AS yang mengalami penurunan kekuatan relatif. Ross membedakan *soft balancing* sebagai adanya kebijakan militer *great power* dan kebijakan penyesuaian oleh *secondary state* yang menunjukkan adanya pengaruh politik *BoP*. Sedangkan untuk *hard balancing* yaitu penggunaan kerjasama militer dan strategis untuk menyeimbangkan kekuasaan, realist berpendapat bahwa ketergantungan ekonomi cukup untuk menjelaskan terjadinya penyesuaian *secondary state*.

Balancing merupakan proses yang dibutuhkan sebelum tercapainya *equilibrium* sepanjang prosesnya, *rising power* bisa memaksa *secondary state* untuk memfasilitasi *rising power* meskipun dalam kondisi ketiadaan kekuatan *equilibrium great power*. Pertimbangan pengaruh independen kekuatan ekonomi pada penyesuaian *secondary state* memiliki ukuran atau indikator kekuatan ekonomi yang meningkat, indikator kunci-nya yaitu ekspor dan investasi asing langsung *secondary state*, dimana ada 2 syarat yang harus dimiliki oleh negara dengan kekuatan ekonomi (Ross 2006 p. 367):

1. *Rising economic power* menantang kekuatan ekonomi status quo dengan mengganti kekuatan status quo sebagai target utama ekspor negara-negara *secondary state* dan mengarahkan investasi asing.

2. *Rising economic power* harus menarik investasi dan ekspor *secondary state* yang memadai/cukup untuk memungkinkannya mengendalikan kondisi ekonomi *Secondary state*

Menurut G. Jhon Ikenberry dalam *From Hegemony to the balance of power: the rise of China and American grand strategy in East asia* dan Ross menjelaskan bahwa ada 2 determinan *balance of power* Tiongkok dalam bidang politik dan ekonomi, dibidang politik Tiongkok dengan ideologi komunis-nya menjadi pembeda dengan negara-negara lain seperti Amerika serikat dan beberapa negara asia tenggara yang menganut demokrasi, sedangkan di bidang ekonomi Tiongkok menjadi acuan negara-negara sekunder menjalin hubungan ekonomi baik melakukan perdagangan maupun investasi. Dalam studi literatur *balance of power* Tiongkok menggunakan beberapa kerangka kerjasama ekonomi untuk membangun *state alignment* dengan negara lain diantaranya adalah proyek BRI (*Belt and Road Initiative*), AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*), *Made in China 2025*, usaha-usaha tersebut menurut beberapa penelitian bermaksud untuk membangun aliansi politik internasional.

1.6 Hipotesis

Penggunaan *balance of power*, *power* dibedakan sebagai *power* secara material yaitu militer (*hard power*) dan kekuatan laten (*soft power*) yang merujuk pada komposisi sosial dan ekonomi, kombinasi keduanya menghasilkan *smart power*. *Smart power* china terdiri dari dua yaitu dengan pengembangan teknologi sebagai strategi pertahanan dan strategi geopolitik melalui pembangunan pangkalan militer di Laut China Selatan. Disamping itu, Tiongkok menginisiasi kebijakan ekonomi dilakukan dengan menyelenggarakan kerjasama ekonomi. Secara ekonomi Tiongkok memperkuat konektivitas ekonomi dan perdagangannya dengan negara lain. Maka dari itu, prespektif Tiongkok dalam perang dagang adalah terbentuk *state alignment* dengan implementasi beberapa program yaitu BRI (*Belt and Road Initiative*), AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*), *Made in China 2025*.

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Perang Dagang

Ahli ekonomi tidak memiliki definisi yang ditetapkan akan tetapi perang dagang seringkali merujuk pada konflik internasional yang berkelanjutan, berlarut-larut dengan intensitas yang tinggi dimana negara berinteraksi, melakukan tawar-menawar dan adanya aksi saling balas dari negara lawan (*tit-for-tat*) atas tujuan ekonomi terkait langsung dengan barang dan jasa dengan cara melakukan pembatasan aliran barang dan jasa (Zeng dalam William, 2019 p. 8).

1.7.1.2 *Balance of Power*

Menurut paradigma realis *balance of power* merupakan pola perilaku negara yang dihasilkan dari kombinasi antara sistem internasional yang anarki dengan kekuatan relatif yang dimiliki setiap negara (Folker 2006 p. 14). Dimana kekuatan (*power*) diperoleh dengan cara melakukan aliansi antar negara dengan kekuatan lemah dan membentuk perjanjian formal atau informal secara eksternal atau secara internal melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya internal ke kelompok untuk meningkatkan kekuatan mereka (Donnelly, dalam Burchill et al. 2005 p. 36). Kekuatan (*power*) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kapabilitas material yang dikendalikan oleh suatu negara, bagi realisme struktural *power* merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan negara untuk menjaga kelangsungan hidup (*survival*). Kekuatan militer merupakan aset yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai *balance of power* selain itu ada pilihan kekuatan lain yang disebut sebagai kekuatan laten atau *soft power* yang didasarkan pada kekayaan suatu negara baik itu budaya, ekonomi, populasi, pengembangan teknologi, dan pendidikan yang dimiliki oleh suatu negara (Mearsheimer dalam Dunne et.al, 2012 p. 78), kombinasi dari kedua kekuatan tersebut menghasilkan *smart power*, merupakan kapasitas yang dimiliki oleh suatu negara untuk menggabungkan kekuatan material dengan kekuatan laten untuk

mencapai tujuan atau kepentingan nasional secara efisien dan efektif (Wilson 2008 p. 110).

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Perang Dagang

Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018 merupakan efek yang disebabkan oleh penerapan prinsip proteksionisme² oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Proteksionisme perdagangan dapat dilakukan dalam bentuk penerapan tarif, kuota, standar produk dan subsidi pemerintah (Rose, et. al, 2013 p. 576). Praktek proteksi dagang menentang rezim perdagangan bebas, secara spesifik perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dilakukan dengan menggunakan hambatan dagang tarif dimana pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kenaikan tarif pada produk-produk tertentu asal Tiongkok, begitupun sebaliknya yang dilakukan Tiongkok pada produk asal Amerika Serikat sebagai bentuk balasan.

Hambatan tarif³ pada dasarnya adalah menaikkan tarif terhadap barang atau produk impor asal negara lain. Tarif adalah pajak tertentu yang diberikan pada barang impor, pengenaan tarif impor oleh suatu negara bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara pengimpor juga sebagai cara untuk melindungi industri domestik dan produksi. Dalam sejarahnya, pengenaan tarif diawali pada *Great depression* yang terjadi pada tahun 1930-an, dimana Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan ekonomi AS dengan meloloskan *Smoot-Hawley Tariff Act* yang mana dalam undang-undang tersebut pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif pada produk pertanian dan barang-barang manufaktur (William, 2019 p. 8).

² Proteksionisme atau nasionalisme ekonomi adalah suatu kebijakan perdagangan yang digunakan pemerintah sebagai alat politik yang bertujuan mengganggu ekonomi pasar (Chappelow, 2019)

³ Hambatan tarif ada 2 (dua) jenis (William, 2019 p. 1), yaitu ;

a. Tarif spesifik yaitu biaya tetap yang dikenakan pada satu unit barang impor, tarif ini bervariasi tergantung tipe barang yang diimpor.

b. Tarif *ad valorem* adalah tarif yang dikenakan pada barang yang didasarkan pada presentase nilai barang. Sebagai contoh: tarif *ad valorem* dikenakan pada mobil yang berasal dari AS sebesar 15% yang diekspor ke Jepang hal ini bertujuan untuk melindungi produsen domestik dan menjaga harga produksi domestik.

Tariff-rate quota (TRQs) merupakan pengenaan tarif yang didasarkan pada jumlah kuota impor yang mana jenis hambatan tarif ini melibatkan dua skema tarif dua tingkat dimana tingkat tarif berubah tergantung pada tingkat impor, ketika nilai atau jumlah impor tertentu rendah, tingkat tarif yang lebih rendah berlaku, tapi ketika melebihi ambang batas, semua impor tambahan menghadapi tingkat tarif yang lebih tinggi. Kuota impor merupakan hambatan non-tarif yang diberlakukan untuk membatasi jumlah produk yang dapat diimpor atau yang masuk ke suatu negara selama jangka waktu tertentu, sebagai contoh suatu negara memberlakukan kuota pada volume jeruk impor yang diizinkan. hambatan non-tarif kuota impor memungkinkan untuk mencegah terjadinya dumping⁴(William, 2019 p. 1).

1.7.2.2 Balance of Power

Menurut realisme struktural politik *balance of power* merupakan hasil intrinsik dari sistem internasional yang anarki, sedangkan menurut realis tradisional *balance of power* merupakan bagian dasar dari politik internasional karena *balance of power* akan terus terjadi dan terulang apabila *great power* selalu berusaha meningkatkan kapabilitas mereka sebagai tanggapan dari kapabilitas yang baru muncul dari *great power* lainnya, distribusi kapabilitas kekuatan menjadi faktor penentu negara melakukan *balancing* terhadap kekuatan *great power* (Ross, 2006 p.359). Dalam struktur internasional yang anarki negara cenderung menyelamatkan dan menjaga kelangsungan hidup negaranya dengan melakukan penyeimbangan terhadap *great power* baik secara eksternal dengan melakukan aliansi atau dengan mengalokasikan sumber daya untuk keamanan nasional sehingga tercapai *power* yang diinginkan (Donnelly, dalam Burchill et al. 2005, p. 36).

Menurut R. S. Ross dalam *Balance of Power Politics and the rise of China: accommodation and balancing in East asia* keputusan negara untuk melakukan *alignment* merefleksikan persepsi kapabilitas intensi suatu negara sehingga kapabilitas *great power* digabungkan dengan perilaku kebijakan luar negerinya

⁴ Dumping adalah politik dagang yang menerapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga yang biasanya diterapkan di pasar dalam negerinya sendiri. Dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan mematikan persaingan. www.wto.org diakses pada 01/03/2019

dapat menentukan apakah negara akan menyeimbangkan kekuatannya. Selain itu *state alignment* juga mencerminkan dampak dari ideologi, lembaga multilateral dan pengaruh kesamaan budaya pada persepsi ancaman dan politik *balance of power*. Literatur *balance of power* secara umum menolak peran ketergantungan ekonomi dalam keberpihakan negara sekunder dan lebih menekankan pada peran kekuatan militer, sedangkan menurut literatur ekonomi politik realis secara umum mengabaikan peranan dari kapabilitas militer dan lebih menekankan pada kemampuan independen kekuatan ekonomi suatu negara untuk memaksa terjadinya *alignment* oleh *secondary state*.

Selanjutnya Ross mendefinisikan *great power* sebagai negara-negara yang bisa bersaing dalam perang dengan negara lain yang berada dalam sistem contoh negara yang masuk dalam istilah ini adalah Amerika Serikat, sedangkan *secondary state* adalah negara-negara yang tidak bisa secara mandiri menyediakan keamanan mereka terhadap negara lain, contoh negara-negara yang masuk dalam kategori ini adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Singapura, Indonesia dan Malaysia. *Rising power* adalah negara dengan kapabilitas kekuatan yang meningkat dan baru muncul untuk kemudian digadang-gadang masuk dalam kategori *great power* dalam hal ini adalah Tiongkok.

Literatur ekonomi politik realis mengatakan bahwa ketergantungan ekonomi sudah cukup untuk menjelaskan terjadinya penyesuaian oleh *secondary state*, dimana *economic great power* akan mengembangkan kekuatan politiknya dengan ketergantungan *secondary state* pada pasarnya untuk ekspor, yang mana akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan stabilitas politik. Dalam satu literatur yang sama juga mengatakan bahwa *great power* dengan kapabilitas militer saja yang bisa mempengaruhi negara untuk melakukan *alignment*, dengan penekanan dua sumber kekuatan yang berbeda ini memberikan variasi yang berbeda tentang pengertian *great power*; dimana *great power* dengan kapabilitas militer, *great power* dengan kapabilitas ekonomi dan *great power* yang memiliki kedua kapabilitas tersebut (Ross, 2006 p. 366).

Dalam hal ini, *power* yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan negara untuk menjaga kelangsungan hidup (*survival*) (Donnelly, dalam Burchill et al. 2005, p. 41 - 42). Menurut Maersheimer dalam *International Relations Theories Discipline and Diversity* yang ditulis oleh Tim Dunne dkk *power* merupakan kapabilitas material seperti kepemilikan persenjataan militer dan nuklir atau biasa disebut sebagai *hard power*, ada pula kekuatan laten atau pilihan kedua, menurut Joseph Nye dalam tulisannya yang berjudul *Soft power* yaitu kekuatan yang merujuk pada kepemilikan populasi, budaya, teknologi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi (*socio-economic ingredients*) atau disebut sebagai *soft power*, penggabungan antara *hard power* dan *soft power* menghasilkan *smart power*, dimana kekuatan material seperti persenjataan militer dan kekuatan laten seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, jumlah populasi menghasilkan kekuatan pintar untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

1.7.3 Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif. Metode penelitian eksplanasi adalah metode penelitian yang menggambarkan dua variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang menjelaskan hubungan atau pengaruh kedua variabel tersebut. Menurut Singarimbun (2003, p. 46) metode eksplanasi adalah apabila peneliti menjelaskan hubungan atau pengaruh kausal (sebab – akibat) antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, metode ini dinamakan penelitian penjelasan (*Explanatory Research*).

Penulis menggunakan tipe ini karena sesuai dengan topik penelitian yang diambil yaitu “Tiongkok: Analisa *Balance of Power* dalam Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok”, dimana upaya penyeimbangan kekuatan yang dilakukan oleh Tiongkok menyebabkan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018, bagaimana konsep *balance of power* menjelaskan pengaruh upaya *balancing* yang dilakukan Tiongkok yang kemudian menyebabkan perang dagang antara kedua negara.

1.7.4 Jangkauan penelitian

Jangkauan Penelitian ini membahas mengenai upaya *balance of power* yang dilakukan Tiongkok atas kekuatan hegemon Amerika Serikat hingga menyebabkan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang terjadi pada tahun 2018.

1.7.5 Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Search*), adalah metode penelitian yang menggunakan sumber dari berbagai kepustakaan, buku-buku, karangan ilmiah, surat kabar, majalah serta media elektronik, seperti internet yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai data-data penelitian (Bakry, 2016: 15).

Metode pengumpulan data lainnya yaitu dengan memanfaatkan dokumen dalam bentuk catatan, seperti: buku harian, surat pribadi, autobiografi. Dalam Studi dokumentasi data dapat diperoleh melalui dokumen resmi yang terbagi ke dalam dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan, risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor dan lainnya. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan informasi yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh lembaga sosial, seperti majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan oleh media massa. Studi dokumentasi memanfaatkan media masa internet guna mendapatkan data dari artikel-artikel berita penting, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian beberapa tokoh yang ahli di bidang tertentu/terkait atau yang sedang mempelajari bidang tersebut (Moleong, 2011: 160-163).

1.7.6 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang disampaikan oleh penulis dalam bentuk

deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011: 6).

1.7.7 Sistematika penulisan

Penelitian ini terbagi kedalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data serta sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan hubungan Amerika serikat dengan Tiongkok dan alur perang dagang antara Amerika serikat dengan Tiongkok yang terjadi pada tahun 2018.

BAB III menganalisa upaya *balance of power* yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika serikat sehingga menimbulkan perang dagang antara kedua negara pada tahun 2018.

BAB IV merupakan kesimpulan yang berisi hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dan kesimpulan penelitian.